

**NASKAH AKADEMIK**  
**UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI**  
**TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP**  
**LIAR DI KABUPATEN SLEMAN**




**oleh :**

**Nama : Yosep Dwi Rahadyanto**  
**Dosen Pembimbing : P. Prasetyo Sidi Purnomo**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2014**




**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NASKAH AKADEMIK**  
**UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI**  
**TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP**  
**LIAR DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**  
**Yosep Dwi Rahadyanto**  
**NPM : 06 05 09460**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pidana**

**Telah Disetujui**  
**Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 29 - 4 - 2014**

**Dosen Pembimbing**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo**



# UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KABUPATEN SLEMAN

## ABSTRAKSI

Judul penelitian hukum adalah " Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Perjudian Balap Liar Di Kabupaten Sleman " Tujuannya adalah untuk menentukan tindakan polisi polisi Lahore untuk mengatasi aksi balap liar dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam aksi balap liar di studi normatif mereka yurisdiksi . dilakukan , dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , sekunder dan bahan hukum tersier . melakukan penelitian dan wawancara , dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis , yang dilakukan dengan penelitian perpustakaan untuk menemukan sumber data, penulis juga menggunakan metode kualitatif dalam pemikiran penalaran deduktif dengan menggambarkan kesimpulan .Kesimpulannya adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh unit lalu lintas kepolisian polisi dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah ini dengan patroli jalan raya secara teratur , melakukan peraturan pendidikan dan lalu lintas hukum kepada masyarakat , untuk membimbing , dan menindak perjudian balap liar dan menangkap pelaku mendelegasikan kasus ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut untuk pengenaan sanksi denda pengadilan dan baik sanksi pidana. Upaya untuk memerangi aksi balap liar tidak dapat sepenuhnya diberikan pada polisi hanya karena keterbatasan polisi itu sendiri , dan oleh karena itu diperlukan kemitraan yang baik dengan masyarakat untuk secara aktif berkontribusi bersama-sama mengatasi aksi balap liar , yang diharapkan akan menciptakan keamanan , ketertiban dan keselamatan di jalan raya untuk kebaikan bersama masyarakat

.Kata kunci : Hukum , Polisi , Perjudian dan Balap Liar

# EFFORTS AND OBSTACLES IN MITIGATING the POLICE CRIME OF WILD RACING GAMBLING IN THE DISTRICT SLEMAN

## ABSTRACT

Legal research title is " Effort And Constraints Police Tackle Crime In Illegal Gambling Racing in Sleman Regency " The goal is to determine the Lahore police police action to tackle illegal racing action and overcome obstacles encountered in the wild racing action in their jurisdiction normative studies . performed , using secondary data consisting of primary legal materials , secondary and tertiary legal materials . conduct research and interviews with informants to obtain information needed writer , who conducted the research library to find the source of the data , the authors also use qualitative methods in thinking deductive reasoning to draw conclusions . conclusion is a form of action taken by the police traffic unit police in tackling wild racing action in this area by the highway patrol on a regular basis , conduct traffic regulations and legal education to the community , to guide , and crack down on illegal gambling and racing to catch offenders delegate the case to the prosecutor for further processing for the imposition of financial penalties and court both criminal sanctions . Efforts to combat illegal racing action can not be fully given to the police just because of the limitations of the police themselves , and therefore need a good partnership with the community to actively contribute jointly address illegal racing action , which is expected to create security, order and safety on the highway for the common good of society.

**Keywords :** Legal , Police , Wil Gambling and Racing



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan sejumlah uang atau barang, dimana yang menang mendapat keuntungan uang taruhan atau barang. Seiring perkembangan jaman, muncul suatu metode permainan judi balap liar yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung di antara orang-orang yang melaksanakan permainan judi balap liar ini. Para petaruh pada umumnya melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disatu tempat yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan dengan menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak yang bertaruh. Pihak disini terdiri dari joki sebagai orang yang mengendarai kendaraan dalam sebuah perlombaan, penonton dan biasanya pemilik bengkel yang memiliki kendaraan untuk digunakan balap liar. Jika salah satu menang dalam perjudian balap motor ini maka pihak yang menang berhak mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.<sup>1</sup>

Perjudian balap liar di Kabupaten Sleman saat ini sedang marak dan tentunya ini menjadi masalah serius menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> .Modifikasi mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak,file: <http://anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.htm>

masyarakat. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum, balap liar juga merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa orang lain karena mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang dilakukan di jalan raya dan tentu akan membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b) dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c) dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan. Pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran peraturan lalu lintas mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor Pasal 48, Ketertiban dan Keselamatan Pasal 106, batas kecepatan Pasal 115, Pemeriksaan kendaraan bermotor Pasal 266, ketentuan pidana Pasal 283 dan Pasal 287 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Aparat Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dimana menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik dalam penelitian hukum ini mengajukan judul **“Upaya Dan Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman “**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Tindakan apa yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam Menanggulangi Tindak Pidana perjudian balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
  2. Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah kabupaten Sleman?
- dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman.

## **BAB II**

### **UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepolisian**



Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat<sup>2</sup>. Dasar hukum mengenai kepolisian terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tersebut sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 tahun 1997. Kelahiran Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002.

## **2. Kedudukan dan Struktur Organisasi Keanggotaan Kepolisian**

Apabila mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>3</sup>. Berikut beberapa penjelasannya :

### **1. Kedudukan Kepolisian menurut Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000**

Berkaitan dengan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut kedudukan kepolisian di atur dalam Pasal 7 ayat (2) yang substansinya, bahwa “Kepolisian

---

<sup>2</sup> Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Persektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm 6

<sup>3</sup> Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang , Yogyakarta, hlm 263

Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Hal ini dimaksudkan dapat dimaknai, bahwa Presiden secara kelembagaan membawahi kepolisian dan penyelenggaraan kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Substansi dari Pasal 7 ayat (2) dimaksudkan juga dicermati merupakan penetapan yang menguatkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sebelum dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 yang substansinya mengatur tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Kedudukan Polisi menurut Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002

Secara umum Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 mengatur tentang organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam Pasal 1 menegaskan tentang kedudukan kepolisian, yang substansinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden”.

## 3. Susunan Kepolisian

Susunan yang dimaksud dalam hal ini adalah jenjang kesatuan dalam organisasi. Susunan Kepolisian ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 tahun 2002 yang substansinya sebagai berikut

- (1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

- (2) Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.
- (3) Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

#### **4. Fungsi dan Tugas Kepolisian**

Dilihat dari sejarah perkembangannya secara teoritis, Kepolisian lahir bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan damai. Peran Kepolisian sangatlah penting di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, Kepolisian di manapun di dunia ini pada umumnya mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, Kepolisian adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai. Kedua, Kepolisian adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat.<sup>4</sup>

#### **5. Wewenang Kepolisian**

Polri secara umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

---

<sup>4</sup> H.Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), LaksBang Mediatama, Surabaya, Hlm 173



d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

## **B. Tinjauan Umum Perjudian Balap Liar**

### **1. Pengertian Perjudian.**

Judi dapat di artikan sebagai aktivitas yang dipertaruhkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan apabila kita memenangkan taruhan, semakin besar uang atau barang yang ditaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.<sup>5</sup>

### **2. Pengertian Balap Liar.**

Pengertian balap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

---

<sup>5</sup> Deddy Ramses //plus.google.com/113433339776683516327/posts/hWoqg76giF5

### **3. Kategori Perjudian Balap Liar.**

Masalah perjudian balap liar adalah sebuah kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat khususnya usia muda (anak muda) yang merupakan salah satu dampak langsung dari perkembangan era globalisasi. Semua aspek berkembang, tetapi tidak diikuti dengan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mengontrol laju perkembangan itu sendiri. dengan istilah lokal “tarungan” atau “liaran” biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, jenis balapan yang sering digunakan adalah jenis “drag race” yaitu adalah adu kecepatan dengan menggunakan media taruhan berupa uang yang dilakukan di lintasan lurus dalam sekali race atau sekali pertarungan dan membagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Tarungan standar atau kelas bawah
2. Tarungan settingan atau kelas menengah
3. Tarungan gedon atau kelas atas

### **4. Modus Perjudian Balap Liar.**

Adanya kegiatan perjudian balapan liar di wilayah Kabupaten Sleman berbeda-beda. biasanya dilandasi motif ekonomi yaitu adanya unsur taruhan di dalamnya. motif taruhan dengan sejumlah nominal uang bila terjadi kesepakatan antar pelakunya. Di Indonesia sebenarnya belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan perjudian balap liar, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku jika terbukti melakukan perjudian dan ketentuan balap liar diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar.

## **5. Kitab Undang-undang Pidana**

Kelalaian, kealpaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal juga diancam dengan sanksi pidana yang diatur pula dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya untuk pembandingan dimana ada kesamaan inti aturan untuk dua Undang-Undang, yang satu bersifat umum dan yang satunya bersifat lebih khusus, untuk yang berkaitan dengan lalu lintas diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sedang yang bersifat umum selain yang berhubungan dengan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

### **1. Pasal 359 KUHP**



Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

## **2. Pasal 503 KUHP**

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

- (1) Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
- (2) Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadah atau sidang.

## **C. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Perjudian Balap Liar**

### **1. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Perjudian Balap Liar**

Istilah menanggulangi sering diartikan sebagai tindakan mencegah atau menangani suatu terkait dengan tugas pokok POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, dimana polisi yang berwenang sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan aksi balap liar di Kabupaten Sleman sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum yang berkaitan langsung dengan Perjudian dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun

atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan hukum pidana itu sendiri maupun dengan peraturan lalu lintas yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Dalam upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sleman maka pihak kepolisian khususnya Polres Sleman melakukan usaha Preemptif adalah dengan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus perjudian balap liar di wilayah hukum Polres Sleman, dengan menempuh beberapa cara, yaitu :

- a. Melakukan patroli
- b. Melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat
- c. Pembinaan dan penjatuhan sanksi baik denda maupun pidana (bila ada pelaku aksi balap liar yang tertangkap)

## **2. Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Perjudian Balap Liar**

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan aksi balap liar di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh jajaran Polres Sleman, tentu tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh jajaran Polres Sleman khususnya Satlatnas Polres Sleman adalah :

- a. Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polres Sleman, piket di masing-masing polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan balap liar menjadi kurang optimal.

- b. Waktu kejadian yang terjadi dari tengah malam hingga dini hari. Perjudian balap liar biasanya terjadi pada malam hari, biasanya dilakukan di atas jam 10 malam hingga dini hari. Pada jam tersebut adalah jam orang beristirahat dan di setiap polsek hanya ada anggota jaga piket malam yang jumlahnya terbatas
- c. Kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patroli jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya perjudian aksi balap liar sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman.
- d. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah, kurangnya kesadaran dan efek jera dari Pelaku balap liar seakan tidak pernah jera melakukan aksi balap liar meskipun pernah ditangkap oleh polisi dalam razia dan telah dikenai sanksi denda maupun dikenai sanksi pidana. Sanksi denda diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Perjudian aksi balap liar yang telah diatur dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b) dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c) dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan Kitab Undang-undang Pidana serta dalam



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan untuk pemberian sanksi pidana dilakukan apabila adanya indikasi keterkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh pelaku balap liar dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- e. Hilangnya barang bukti berupa uang taruhan yang akan di taruhkan dalam aksi perjudian balap liar, biasanya ada orang yang ditunjuk para pelaku taruhan yang akan membawa uang taruhan dan menunggu ditempat aman jika para pelaku telah selesai melakukan aksi balap liar. Tugas orang tersebut akan menyerahkan uang dari kesepakatan besarnya taruhan yang telah disepakati kedua belah pihak tadi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Reserse Kriminal dan di bantu Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.

2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satlantas Polres Sleman dan Reserse Kriminal dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi disetiap jam jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan oprasional dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Peran polisi yang perlu ditingkatkan dalam menanggulangi aksi balap liar adalah meningkatkan intensitas patroli di jalan raya, meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penindakan lebih tegas pada pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala polisi dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar adalah meningkatkan jumlah personil terutama di setiap jam jaga polsek dan kegiatan patroli mampu memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat secara menyeluruh, kegiatan olahraga cabang balap sepeda motor dengan membuat sirkuit permanen dan memfasilitasi anak muda yang ingin serius dibidang tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku :

H.Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), LaksBang Mediatama , Surabaya, Hlm 173.

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm 6.

### Website :

Modifikasi mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak, file:

<http://anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.htm>.

DeddyRamses//[plus.google.com/113433339776683516327/posts/hWoqg76giF5](https://plus.google.com/113433339776683516327/posts/hWoqg76giF5)

